

JURNAL PENELITIAN

KEBIJAKAN PENATAAN KAWASAN MASJID AGUNG JAWA TENGAH DAN MUSEUM PERKEMBANGAN ISLAM JAWA TENGAH

David Fajar, D2B606010, Dra, Wiwik widayanti, M Si, Dra Puji Astuti, M Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

Jl. Prof H Soedharto Tembalang, Semarang 1269, Phone (024) 7465407

ABSTRACT

In this study, researchers wanted to know how the government's efforts to develop the city of Semarang in Central Java tour of the grand mosque and Museum of Islamic development in Central Java. And the researchers also wanted to know how the arrangement of tourism policy efforts against street vendors Semarang City Government located in the tourist area of the Great Mosque of Central Java.

This type of research is a qualitative descriptive study using a type. This study analyzes how policy structuring the grand mosque and museum java java development of Islam.

After an examination of the efforts and policies, the result of research that says that the process of policy development is good, although still lacking, and the stage of the development process and evaluation of tourism management of the Great Mosque of Central Java and Central Java, Islamic Development Museum itself, and others are running with quite well despite some problems arise and deviations from post-relocation arrangement tourist area.

Advice that I can give to Make tourism operators or community groups that function in order to help clear the course of the policy, to help manage such tourist vehicles, tricycles,

motorcycles currently chaotic situation and help mentertibkannya tourist location. Then make sure the rules of the policy arrangement tourist area of Central Java Great Mosque and Museum of Islamic Development in Central Java, provide sufficient budget funds to pay more attention to the construction and development of tourist attractions in the city of Semarang.

Keywords: Planning Policy, the Great Mosque of Central Java, Central Java Museum of Islamic Development

ABSTRAKSI

Pada penelitian ini, peneliti hendak mengetahui bagaimanakah upaya pemerintah Kota Semarang dalam melakukan pengembangan wisata masjid agung Jawa Tengah dan Museum perkembangan islam Jawa Tengah. Dan peneliti juga ingin mengetahui bagaimanakah upaya kebijakan penataan pariwisata Pemerintah Kota Semarang terhadap PKL yang berada di kawasan wisata Masjid Agung Jawa Tengah.

Tipe penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menganalisa bagaimana kebijakan penataan masjid agung jawa tengah tersebut dan museum perkembangan islam jawa tengah.

Setelah dilakukan penelitian terhadap upaya dan kebijakannya, diperoleh hasil penelitian yang menyebutkan bahwa proses kebijakan dalam pengembangan sudah baik walaupun masih kurang dan dalam tahap proses pengembangan dan evaluasi pengelolaan pariwisata Masjid Agung Jawa Tengah dan Musium Perkembangan Islam Jawa Tengah itu sendiri, dan lainnya sudah berjalan dengan cukup baik meski timbul beberapa permasalahan dan penyimpangan yang muncul pasca relokasi penataan Kawasan wisata.

Saran yang dapat saya berikan Membuat kelompok pengelola wisata atau paguyuban yang jelas fungsinya agar dapat membantu jalannya kebijakan tersebut, membantu mengelola

kendaraan wisata seperti, becak, ojek yang saat ini keadaannya semrawut dilokasi wisata dan membantu mentertibkannya.

Kemudian membuat peraturan yang pasti tentang kebijakan penataan kawasan wisata Masjid Agung Jawa Tengah dan Musium Perkembangan Islam Jawa Tengah, memberikan dana anggaran yang cukup untuk lebih memperhatikan pembangunan dan pengembangan tempat-tempat wisata di kota Semarang.

Kata kunci : Kebijakan Penataan, masjid Agung Jawa Tengah, Museum Perkembangan Islam Jawa Tengah

PENDAHULUAN

Pariwisata mempunyai beberapa ragam dan jenis yaitu meliputi wisata argo, wisata bahari, wisata minat khusus, wisata budaya serta wisata religiyang salah satu bentuknya adalah "*wisata religi*". Setiap wisatawan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Namun demikian, seiring dengan perkembangan jaman, maka tuntutan para wisatawan akan terus semakin bervariasi. Oleh karena itu, kita perlu mengantisipasi perkembangan ini dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen yang lebih profesional (Laporan akhir Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pem Kota Semarang, 2007).

Di Kota Semarang banyak mempunyai obyek wisata diantaranya adalah Masjid Agung Jawa Tengah dan Museum Perkembangan Islam Jawa Tengah yang terletak disamping masjid itu sendiri. Kita tahu wisata religi ini berkaitan dengan pendalaman iman yang sudah menjadi tradisi ini. Meski mempunyai bebagai potensi ternyata pendapatan yang masuk ke daerah dari aspek itu cukup besar.

Akan tetapi, tingginya minat wisatawan ini belum didukungoleh infrastruktur pariwisata yang memadai. Akhirnya sebagian warga Kota Semarang memilih untuk berwisata kedaerah lain yang memiliki tempat wisata. Masjid selain disiapkan sebagai tempat ibadah,

juga dipersiapkan sebagai objek wisata religius. Untuk menunjang tujuan tersebut, masjid dilengkapi dengan wisma penginapan dengan kapasitas 23 kamar berbagai kelas sehingga para peziarah yang ingin bermalam bisa memanfaatkan fasilitas ini.

Maka dari itu Pemerintah Kota Semarang melakukan suatu gebrakan untuk kawasan wisata Masjid Agung Jawa Tengah, dengan mendirikan unit usaha angkutan dan biro wisata sejak tahun 2004, itu adalah langkah yang sudah tepat. Akan tetapi langkah itu belumlah cukup. Pengembangan pariwisata harus merupakan langkah yang komperhensif dan terintegrasi, meliputi lima unsur yang penting (spillane, 1994 : 69) yakni : (dikutip dari Laporan akhir Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pem Kota Semarang, 2007)

- a) Atraction (adanya pertunjukan yang menarik para wisatawan),
- b) Facilities (adanya fasilitas-fasilitas yang diperlukan),
- c) Infrastructure (adanya infrastruktur yang diperlukan),
- d) Transportation (adanya jasa pengangkutan yang nyaman) dan,
- e) Hospitality (kesediaan untuk menerima tamu dengan ramah dan mengesankan).

1.2.Perumusan Masalah

Dari uraian permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan pengembangan wisata Masjid Agung Jawa Tengah dan Museum Perkembangan Islam Jawa Tengah.

2. Bagaimanakah upaya kebijakan penataan pariwisata Pemerintah Kota Semarang terhadap PKL yang berada dikawasan wisata Masjid Agung Jawa Tengah.

1.3.Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Kota Semarang dalam pengembangan wisata dan penataan kawasan wisata di Masjid Agung Jawa Tengah dan Museum Perkembangan Islam Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya kebijakan penataan pariwisata Masjid Agung Jawa Tengah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang terhadap PKL yang berada di kawasan wisata Masjid Agung Jawa Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi atas tiga kategori utama yakni:

1. Manfaat bagi peneliti.

Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam upaya pengembangan wisata dan penataan kawasan wisata Masjid Agung Jawa Tengah dan Museum Perkembangan Islam Jawa Tengah, terhadap PKL di kawasan wisata Masjid Agung Jawa Tengah.

2. Manfaat bagi lembaga pendidikan

Untuk memperkaya khasanah penelitian kebijakan pengembangan wisata dan penataan PKL yang ada didalamnya.

3. Manfaat bagi pembaca

Untuk menambah wawasan dan referensi tentang penelitian kebijakan

pengembangan wisata dan penataan PKL.

PEMBAHASAN

3.1.1. Persepsi Pelaku Pariwisata Terhadap Wisata Ziarah.

3.1.1.1. Persepsi Kantor Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Semarang.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan pihak Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Kewenangan kantor pariwisata dan kebudayaan Kota Semarang terhadap pariwisata ziarah Masjid Agung Jawa Tengah dan Musium Perkembangan Islam Jawa Tengah pada dasarnya ada 2 (dua) :

- a. Pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana kompleks Masjid Agung Jawa Tengah
- b. Melakukan pungutan terhadap retribusi pengunjung dan parkir di taman parkir. Untuk obyek wisata di Masjid Agung Jawa Tengah dan Musium Perkembangan Islam Jawa Tengah, pengelolaan retribusi pengunjung dan parkir wisata sepenuhnya berada dalam kewenangan Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- c. Membina para PKL yang berjualan disekitar obyek wisata ziarah. Di Masjid Agung Jawa Tengah terdapat ada sekitar 30 (tiga puluh) PKL.

Selain itu Kewenangan Majelis Takmir Masjid Agung Jawa Tengah adalah :

- a. Memelihara bangunan fisik.
- b. Mengelola kegiatan ritual wisata religi dan ziarah;
- c. Mengelola museum dan perpustakaan; dan
- d. Mengelola pemandu wisata ziarah.

3.1.1.2. Persepsi Majelis Takmir Masjid Agung Jawa Tengah dan Musium Perkembangan Islam Jawa Tengah

Obyek wisata religi dan ziarah Masjid Agung Jawa Tengah dan Musium Perkembangan Islam Jawa Tengah mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu,

- a. Sebagai tempat ibadah, para peziarah diwajibkan untuk melakukan kegiatan beribadah sebelum melakukan kegiatan lainnya yang berunsur wisata.
- b. Sebagai tempat melihat perkembangan agama islam terutama pada Jawa Tengah dengan mengunjungi musium perkembangan Islam Jawa Tengah yang berada pada lantai 2 dan 3 menara Al-Husna.

Para pengunjung mempunyai motivasi untuk berziarah datang ke Masjid Agung Jawa Tengah untuk beribadah dan mendoakan para syuhada dan para leluhur dan mengenang jasa para wali dan leluhur, Menenangkan Jiwa, Rekreasi religi atau wisata ziarah untuk mengetahui sejarah tentang perkembangan Islam, serta silaturahmi. Selain itu para peziarah ingin mengharapkan doanya dikabulkan oleh Allah SWT karena sudah mendoakan orang-orang yang disayang oleh Allah SWT, Mendapatkan berkah dari Allah SWT, Mereka mendapatkan ketenangan hati dan pikirannya dalam mencapai kehidupan, Tumbuh Mahabbah (cinta) dari Allah SWT, syuhada, dan para leluhur.¹

Pengelolaan dan pengembangan wisata ziarah Masjid Agung Jawa Tengah dan Musium Perkembangan Islam Jawa Tengah sebaiknya dikelola oleh badan khusus yang memiliki kewenangan penuh, bukan terfragmentasi seperti sekarang ini. Pemerintah Daerah

¹ Hasil wawancara dengan Prasetyo Ariwibowo, ka. Bagian Obyek dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Semarang, Senin, 17 April 2013 pukul 10.30 WIB.

mengelola retribusi pengunjung dan parkir, Majelis Takmir mengurus kegiatan peribadahan. Sebaliknya retribusi pengunjung di tiadakan, karena agak ganjil jika orang beribadah itu di kenakan biaya retribusi.

3.2. Kebijakan Penataan Kawasan Wisata Masjid Agung Jawa Tengah.

3.3.1 Penyelenggaraan Kebijakan Penataan kawasan wisata Masjid Agung Jawa Tengah dan Musium Perkembangan Islam Jawa Tengah.

Kebijakan publik menurut **Thomas Dye** adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is what goverment do, why they do it, and what difference it makes*). Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah bukan organisasi swasta dan kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah (Badjuri dan Yuwono , 2002 : 8).

Dalam proses penataan kawasan wisata didasari dengan adanya peraturan daerah yang mengatur penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL). Kepala Bagian obyek dan daya tarik wisata menyatakan, yang melandasi proses berjalannya penataan kawasan wisata terutama para pedagang kaki lima (PKL) adalah ;²

“Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 “ Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima”, yang tertuang dalam BAB II Pasal 2 “Tentang Pengaturan Tempat Usaha, kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan para PKL untuk penataan Ketertiban”.

Kebijakan penataan kawasan wisata meliputi beberapa kebijakan diantaranya adalah ³

1. Kebijakan penataan Spasial (keruangan) Pariwisata :

³ (<http://arhypemerintahan.blogspot.com/2010/02/kebijakan-pemerintah-terhadap-masalah.html>)

- a. Memberikan arahan yang jelas bagi pengembangan wisata di Kota berdasarkan karakteristik keruangnya melalui penetapan zonasi pengembangan.

Langkah-langkah yang ditempuh untuk membantu pengembangan penataan kawasan wisata dalam upaya penataan PKL di kawasan wisata Masjid Agung Jawa Tengah dan Musium Perkembangan Islam Jawa Tengah yaitu mengadakan temu wicara/dialog dengan PKL tentang penataan untuk keindahan tata kota, agar dapat terlaksana kebijakan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Selain itu, dilingkungan kawasan makam kesultanan, Majelis Takmir yang membantu proses berjalannya suatu kebijakan mempunyai wewenang di kawasan wisata Masjid Agung Jawa Tengah yang bertujuan untuk mewujudkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang, adapun langkah yang ditempuh untuk membantu pengembangan penataan kawasan wisata dalam upaya penataan PKL di kawasan wisata Masjid adalah memberikan arahan pada PKL, Majelis Takmir Masjid Agung Demak **Dr H Noor Achmad, MA**, menyatakan :⁴

“Memberikan arahan pada PKL untuk membantu dalam hal penataan kawasan wisata, mengadakan forum dengan para PKL untuk membicarakan penataan kawasan sesuai instruktur dari Pemerintah Kabupaten Demak”

- b. Untuk kemudahan pembangunan serta pengelolaannya, perlu dilakukan pengelompokkan obyek dan daya tarik wisata pada Satuan Kawasan Wisata (SKW). Satuan-satuan kawasan wisata tersebut merupakan kawasan yang memiliki pusat-pusat kegiatan wisatawan dan mempunyai keterkaitan sirkuit atau jalur wisata.

Dalam pengelolaan pengembangan wisata Masjid Agung Jawa Tengah dan Musium perkembangan Islam Jawa Tengah pada Satuan Kawasan Wisata (SKW). Satuan-satuan

⁴ Hasil wawancara dengan Dr.H. Noor achmad ,MA Wakil Ketua Masjid Agung Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu, 19 April 2013 pukul 10.00 WIB.

kawasan wisata Menurut kepala bagian obyek dan daya tarik wisata Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan **Prastyo Ariwibowo**, menyatakan :⁵

“Mencarikan dana untuk membangun kawasan wisata Masjid Agung Jawa Tengah dan Musium Perkembangan Islam Jawa Tengah, bekerja sama dengan Majelis Takmir Masjid Agung Demak dan yayasan yang ada.

Dalam proses relokasi dan penataan kawasan wisata Masjid Agung Demak dilaksanakan dari tahun 2016-2011, semua bus dan kendaraan wisata sudah menempati tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah yaitu samping Masjid Agung Jawa Tengah Melakukan urutan prioritas pengembangan satuan kawasan wisata dengan memperhatikan dampaknya terhadap perkembangan obyek dan daya tarik wisata.

Setelah diadakannya proses penataan kawasan wisata ada tanggapan dan dampak para PKL dalam pengembangan penataan kawasan wisata akhirnya mereka berterima kasih karena adanya penataan PKL dikawasan wisata oleh Pemerintah Kota.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilaksanakan mengenai kebijakan pengembangan wisata dan penataan kawasan wisata Masjid Agung Jawa Tengah dan Museum Perkembangan Islam Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa proses kebijakan dalam pengembangan sudah baik walaupun masih kurang dan dalam tahap proses pengembangan dan evaluasi pengelolaan pariwisata Masjid Agung Jawa Tengah dan Musium Perkembangan Islam Jawa Tengah itu sendiri sedangkan pada kebijakannya sudah berjalan dengan cukup baik meski timbul beberapa permasalahan

⁵ Hasil wawancara dengan Dr H. Noor achmad, MA Wakil Ketua Masjid Agung Jawa Tengah, Obyek dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Semarang, Senin, 17 April 2013 pukul 10.30 WIB

dan penyimpangan yang muncul pasca relokasi penataan Kawasan wisata, sehingga menyebabkan potensi tersebut tidak dapat optimal.

Saran

Membuat kelompok pengelola wisata atau paguyuban yang jelas fungsinya agar dapat membantu jalannya kebijakan tersebut, membantu mengelola kendaraan wisata seperti, becak, ojek yang saat ini keadaannya semrawut dilokasi wisata dan membantu mentertibkannya.

Membuat peraturan yang pasti tentang kebijakan penataan kawasan wisata Masjid Agung Jawa Tengah dan Musium Perkembangan Islam Jawa Tengah, memberikan dana anggaran yang cukup untuk lebih memperhatikan pembangunan dan pengembangan tempat-tempat wisata di kota Semarang

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah dan Surat Keputusan

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004.

5) Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, BAB II Pasal 2 “Tentang Pengaturan Tempat Usaha (sesuai dengan Keputusan Walikota Semarang)”.

Buku

Abdulkahar Badjuri & Teguh Yuwono. 2002. *Kebijakan Publik : Konsep & Strategi*. JP Universitas Diponegoro : Semarang.

AG. Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Akasah, Hamid. 2006. *Menelusuri Lokasi Bekas Keraton Demak*. CV. Cipta Adi Grafika: Kota wali.

Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo : Yogyakarta.

Charles E. Lindblom. 1991. *Proses penetapan kebijaksanaan*. Erlangga : Jakarta.

Eddi Wibowo, T. Saifful. B, Hessel Nogi S. T, 2009. *Kebijakan Publik dan Budaya*. YPAPI: Jakarta.

- Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2005. *Kebijakan Publik Kontemporer*. Lukman Offset : Yogyakarta.
- Ismayanti. 2010. *Pengantar Pariwisata*. PT. Grasindo: Jakarta.
- Karafir, Yan Pieter. 1987. *Penumpukan Modal PKL*. PT. Aquarista: Jakarta.
- Leo Agustino. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Manning, Chriss dan Tadjudin Noer Effendy. 1991. *Urbanisasi Pengangguran dan Sektor Informal di Kota, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta*.
- M. Irfan Islamy. 2004. *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Riant Nugroho. D, 2007. *Analisis Kebijakan*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Samudra Wibawa. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Raja Grafindo: Jakarta.